

Analisis Pengaruh Korelasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan Terutang pada PT. Hardjono Patra Jaya

Iis Dewi Herawati

Universitas Panca Sakti Bekasi

Pringgo Saputro

Universitas Panca Sakti Bekasi

Email: iisdewiherawati12@gmail.com

Korespondensi penulis: iisdewiherawati12@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to determine differences in corporate tax payments payable before and after the fiscal reconciliation of commercial financial statements. By carrying out a fiscal reconciliation, the company can then make financial reports in accordance with applicable tax regulations.*

In the research conducted, the authors analyzed the data using quantitative and descriptive methods. To obtain the data needed in this writing, the authors carried out data collection activities by means of interviews, documentation and literature studies.

The results of this study conclude that there is a difference between profit according to commercial and fiscal. This difference occurs because corrections are made to costs and income.

Keywords: *Commercial, fiscal correction.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembayaran pajak badan terhutang sebelum dan sesudah dilakukannya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Dengan dilakukannya rekonsiliasi fiskal maka selanjutnya perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode kuantitatif dan deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dokumentasi dan Studi pustaka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba menurut komersial dan fiskal perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi terhadap biaya biaya dan penghasilan terdapat Dilaba rugi komersial, koreksi tersebut dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal..

Kata Kunci: *Komersial, koreksi fiskal.*

LATAR BELAKANG

Ketergantungan pendanaan yang berasal dari luar negeri akan dapat di ahiri dengan cara meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam Era Globalisasi seperti sekarang

pembangunan dan kebutuhan dana menjadi semakin tinggi sehingga ketergantungan pendanaan dari luar negeri dapat diahiri dengan cara meningkatkan pendapatan dari dalam negeri. Penerimaan dalam negeri yang diharapkan mengganti dana pinjaman dari luar negeri adalah pengkatan dari secror perpajakan. Peningkatan penerimaan dalam negeri jelas terlihat dengan semakin besarnya realisasi penerimaan Dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak dari tahun ke tahun di dalam APBN.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan umum perpajakan dan di dalam menyusun laporan keuangan fiskal tidak semua penghasilan dan biaya dapat dihitung dalam laporan keuangan perusahaan dan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan badan. Perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal ini tentunya akan berpengaruh terhadap ajak penghasilan badan dikarenakan perhitungan di dalam menentukan jumlah pajak penghasilan badan dihitung dengan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak penghasilan adalah membuat laporan keuangan komersial, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial terhadap pembayaran Pph badan terhutang.

1.3 Rumusan masalah

berdasarkan permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. seberapa besar pengaruh korelasi fiskal pada laporan keuangan komersial terhadap Pph badan terhutang?
- b. apa saja yang dapat dikoreksi pada laporan keuangan komersial yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

KAJIAN TEORITIS

Akutansi adalah seni pencatatan golongan dan peringkasan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan

petunjuk atau dinyatakan dengan uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya.

Menurut sumarno (2013 : 9) adalah “ suatu sistem yang mengukur aktivitas aktivitas operasional kerja, memproses informasi keadaan bentuk laporan laporan dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan”.

Sistem Akutansi mencatat data ekonomi mengenai kegiatan perusahaan dan hal hal yang terjadi pada perusahaan, yang hasilnya dilaporkan kepada pihak pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan informasi mereka.

Menurut hans kartikahadi, dkk (2012 : 3) dalam buku yang mengutip pengertian akuntansi dirumuskan oleh accounting principles boarf (APB) dan american institute of certified publik accountans (AICPA) pada tahun 1970 menjelaskan pengertian Akutansi sebagai salah satu aktivitas atau kegiatan pelayanan, yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari suatu entitas ekonomi dengan maksud berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dalam memilih secara bijak diantara alternatif tindakan.

2.1. Siklus Akuntansi

Siklus Akutansi adalah suatu proses penyusunan suatu laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan serta diterima secara umum pada prinsip prinsip dan kaidah Akutansi prosedur prosedur metode metode serta dalam teknik teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup Akutansi dalam suatu periode tertentu.

menurut dina fitria (2013 : 30) membagi siklus akuntansi menjadi 4 tahap, sebagai berikut :

1. Tahap pencatatan

Tahap pencatatan ini, merupakan langkah awal dari siklus Akutansi dalam tahap pencatatan mengacu pada transaksi.

2. Tahap penggolongan

Tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokan catatan transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus, kemudian dikelompokkan ke

dalam buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap pengikhtisaran

Tahap selanjutnya dalam siklus Akutansi adalah tahapan pengikhtisaran. Tahap ini adalah buatan Neraca saldo. Neraca saldo (trial balance) berisi saldo akhir dari buku besar dan buku besar pembantu. setelah dilakukan pemindahan saldo saldo buku besar maka selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap akun yang diperlukan.

2.2 Pajak

Menurut prof. Dr. Rochmat soemitro (1992), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Berdasarkan pasal 1 (uu no. 28 tahun 2007), “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya Kemakmuran rakyat.

Objek Pajak

Menurut UU pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, baik dalam bentuk apapun termasuk obyek pajak :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, Honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha

- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- e. Bunga termaksud premium diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- f. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- g. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah keuntungan;
- k. Selisih kurs mata uang asing;
- l. Selisih lebih karena penilaian kembali Aktiva;
- m. Premi asuransi;
- n. Tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh kumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Suplus bank indonesia.

2.3. Subjek Pajak

Secara umum subjek pajak terdiri dari :

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi
- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap (subjek pajak yang diperlakukan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan)

2.4. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun dengan prinsip Akutansi yang berlaku umum dan bersifat netral dan tidak memihak. dalam kerangka dasar standar Akutansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi Yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasalalu. pihak Menejemen bebas memilih standar, metode atau praktik Akutansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

2.5. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek Akutansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari perhitungan laba rugi, rekonsiliasi laporan keuangan konersial dan laporan keuangan fiakal.

2.6. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fisikak untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Terjadinya pebedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari Negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen fiskal.

2.7. Koreksi Fiskal Positif Dan Negatif

perbedaan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial. Koreksi fiskal meliputi

pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif (Siti Resmi, 2008)

a. Koreksi fiskal positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga akan meningkat.

b. Koreksi fiskal negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terutang juga akan menurun.

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data sesuai kebutuhan penelitian, penulis akan melakukan penelitian di PT. Hardjono Patra Jaya yang beroperasi di Jl. Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan selama 4 bualan, dari bulan Juni s.d September 2017.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

3.2.1 Studi Pustaka

Dalam studi keputusan penulisan mencari dan mendalami buku-buku yang menjadi dasar dalam penulisan ilmiah ini, serta meneliti dan mempelajari sumber-sumber infoemasi yang berkaitan dengan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan khususnya mengenai rekonsiliasi.

3.2.2 Studi Lapangan

1. Pengamatan

Pengamatan terhadap metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian melakukan pengamatan langsung terhadap variabel yang akan diteliti ke PT. Hardjono Patra Jaya.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi seputar variabel yang akan diteliti dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan penelitian untuk mendapatkan data di dalam pengumpulan data melalui sumber-sumber yang sudah ada, baik yang berbentuk laporan maupun dokumen yang direfrensikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kuantitatif

Terdapat perbedaan antara perhitungan pajak menurut wajib pajak dan fiktal yang disebabkan karena perbedaan pengakuan pendapat dan biaya yang dimana diakui menurut wajib pajak tetapi tidak diakui oleh fiktal dan perbedaan itu akan menimbulkan perbedaan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ke kantor pajak.

Laporan laba rugi adalah sesuatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu selisih antara pendapatan dan beban merupakan laba rugi yang diperoleh perusahaan.

PT Hardono Patra Jaya menyusun laba ruginya 31 Desember. Laporan laba rugi PT Hardono Patra Jaya adalah sebagai berikut :

4.2 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal Laba Rugi Tahun 2019, 2020, 2021

Dari data perusahaan berupa laporan laba-rugi, maka penulis melakukan korelasi atas laporan laba rugi komersial menjadi laba rugi fiskal untuk menentukan laba kena pajak yang berguna untuk menghitung pajak penghasilan badan.

Berdasarkan table 4.2 disimpulkan terdapat perbedaan laba bersih sebelum pajak, laba yang dihasilkan perusahaan sebelum pajak 2019 sebesar Rp. 359.371.576 dan laba sebuah

koreksi menjadi lebih besar yaitu Rp. 401.132.877, hal ini mempengaruhi besarnya pajak penghasilan terutang yang akan dibayarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data pada masing-masing variabel secara kuantitatif dan deskriptif, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut

5.1.1 Menurut data laporan laba rugi komersial tahun 2019 PT Hardjono Patra Jaya besarnya PPh terutang adalah Rp. 47.112.365, tahun 2020 Rp. 66.017.330 dan tahun 2021 Rp. 72.133.244.

5.1.2 Menurut data laporan laba rugi fiskal tahun besarnya PPh badan terutang PT Hardjono Patra Jaya pada tahun 2019 Rp. 52.587.252, tahun 2020 Rp. 73.819.116 dan tahun 2021 Rp. 82.659.645.

5.1.3 Besarnya selisih PPh badan terutang PT Hardjono Patra Jaya menurut komersial dan fiskal pada tahun 2019 Rp. 5.474.887, tahun 2020 Rp. 7.804.786, tahun 2021 Rp. 10.536.401.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk kepentingan pemenuhan kewajiban perpajakan PT Hardjono Patra Jaya diharapkan dapat memperkecil perbedaan perhitungan laba kena pajak dengan cara menambahkan dan memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-undang Perpajakan serta diusahakan terus berkonsultasi dengan kantor pajak mengenai peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan.

5.2.2 Dalam melakukan perhitungan besar PPh terutang, sebaiknya PT Hardjono Patra Jaya tetap menggunakan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Undang-undang Pajak agar terhindar dari sanksi-sanksi pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono.2010. Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta : ANDI
- Mardiansmo.2016.Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : ANDI
- Mitra Wacana Media. 2015. Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2015. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Neneng Hartati. 2015. Pengantar Perpajakan. Bandung : Pustaka Setia

Thomas Sumarsan. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT. Indeks

Wirawan B Ilyas dan Pandu Wicaksono. 2015. Pemeriksaan Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media

Yusdianto Prabowo. 2004. Akuntansi Perpajakan Terapan. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Tabel 4.1

LAPORAN LABA RUGI PT HARDONO PATRA JAYA

Tahun 2019, 2020, 2021

Keterangan	2019	2020	2021
Pendapatan Usaha	5.046.109.910	5.286.816.363	6.356.415.128
Pembelian	(3.800.610.500)	(3.802.932.090)	(4.772.928.000)
Lab Kotor	1.245.499.410	1.483.884.273	1.583.487.128
Beban umum dan administrasi			
Gaji dan tunjangan karyawan	(721,354,910)	(778,125,689)	(923,522,554)
Perlengkapan operasional	(33,874,000)	(85,525,600)	(30,529,600)
Biaya telpon dan internet	(4,589,000)	(5,793,576)	(6,792,000)
Biaya listrik	(43,398,323)	(40,742,865)	(53,390,304)
Biaya listrik kontrakan	(7,657,820)	(10,247,865)	(13,968,157)
Biaya iklan	(1,300,000)	(6,206,030)	(13, ,253,400)
Biaya jamsostek	(13,235,800)	(19,500,000)	(19,500,000)
Biaya pengobatan	(6,587,725)	(7,241,845)	(7,912,562)
Sumbangan	(23,185,000)	(23,197,000)	(22,970,000)
Biaya penyusutan kendaraan	(27,500,000)	(27,500,000)	(27,500,000)
Biaya penyusutan gedung	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
Biaya perbaikan SPBU	(5,760,000)	(5,236,000)	(12,241,500)
Biaya perbaikan kontrakan	(2,571,000)	(8,591,500)	(8,054,700)
Kemanan dan kebersihan	(6,000,000)	(5,580,000)	(6,000,000)
ATK	(3,760,000)	(6,618,600)	(4,800,000)
Total biaya usaha	(905,773,578)	(1,035,724,723)	(1,155,425,777)
Pendapatan lain-lain			
Pendapatan jasa giro	1.645.744	1.825.955	1.898.542
Pendapatan kontrakan	18.000.000	21.600.000	21.600.000
Pendapatan sewa tempat nitrogen		12.000.000	12.000.000
Lab bersih sebelum pajak	359.371.576	483.585.505	463.559.893

Tabel 4.2
Korelasi fiskal laba rugi PT Hardjono Patra Jaya
Tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Keterangan	Komersial	Koreksi fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan usaha	5.046.109.910			5.046.109.910
Pembelian	(3.800.610.500)			(3.800.610.500)
Laba kotor	1.245.499.410			1.245.499.410
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan tunjangan karyawan	(721,354,910)			(721,354,910)
Perlengkapan operasional	(33,874,000)			(33,874,000)
Biaya telpon dan internet	(4,589,000)	(2,294,500)		(2,294,500)
Biaya listrik	(43,398,323)			(43,398,323)
Biaya listrik dan kontrakan	(7,657,820)	(7,657,820)		
Biaya iklan	(1,300,000)	(1,300,000)		
Biaya jamsostek	(13,235,800)			(13,235,800)
Biaya pengobatan	(6,587,725)	(6,587,725)		
Sumbangan	(23,185,000)	(23,185,000)		
Biaya penyusutan kendaraan	(27,500,000)			(27,500,000)
Biaya penyusutan gedung	(5,000,000)			(5,000,000)
Biaya perbaikan SPBU	(5,760,000)			(5,760,000)
Biaya perbaikan kontrakan	(2,571,000)	(2,571,000)		
Keamanan dan kebersihan	(6,000,000)			(6,000,000)
ATK	(3,760,000)			(3,760,000)
Total biaya usaha	(905,773,578)			(862,177,533)
Pendapatan lain-lain				

Pendapatan jasa giro	1.645.744		1.645.744	
Pendapatan kontrakan	18.000.000			18.000.000
Pendapatan sewa tempat nitrogen				
Laba bersih sebelum pajak	359.371.576			401.132.877